KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	: AHU-256.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	: LAYANAN PERBAIKAN ISIAN DATA PERSEKUTUAN PERDATA

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Perdata
2. Memahami akses SA-BU www.ahu.go.id
3. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Pesan Nama Persekutuan Perdata
2. SOP Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata
3. SOP Pendaftaran Perubahan Persekutuan Perdata
4. SOP Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Perdata
5. SOP Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata
6. SOP Pencatatan Perubahan Persekutuan Perdata
7. SOP Teknologi Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Persekutuan Perdata
3. Printer
4. Jaringan internet

PERINGATAN :

Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERBAIKAN ISIAN DATA PERSEKUTUAN PERDATA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Direktur Badan	Verifikator 2	Verifikator 1	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan akses laman www.ahu.go.id. Memilih menu "perbaikan isian data Persekutuan Perdata". Membeli voucher Pemberian Salinan Korporasi. Melakukan login dengan memasukan kode unik pemohon nama pengguna dan kata sandi Mengisi Jenis Entitas, Nama Entitas, Nomor SKT yang akan diperbaiki, tanggal SKT, serta nomor voucher PNBP sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP PNBP					Nama pemohon NIK/NPWP 16 Digit Email pemohon No HP	-	Bukti perintah bayar voucher Kode voucher perbaikan isian data Persekutuan Perdata (otomatis voucher valid setelah dilakukan pembayaran)	Pelayanan jasa hukum : • Badan Usaha Non Badan Hukum: Perbaikan isian data Persekutuan Perdata
2	Mengeklik tombol 'cari' dan mengunduh formulir permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata. Mengajukan surat permohonan permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata ditujukan kepada Direktur Badan Usaha dengan perihal Permohonan permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata.					Formulir surat permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata	-	Surat permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata	
3	Melakukan pratinjau permohonan kembali. Jika sudah benar, mengunggah dokumen persyaratan					• Surat pernyataan (*dokumen surat pernyataan wajib diunggah dengan ditanda-tangani menggunakan materai) • NPWP • Surat Keterangan Domisili • Salinan Akta Pendirian/Perubahan • Bukti pendukung lainnya.	-	Dokumen persyaratan telah diunggah	- Format surat penyataan berisi data dari notaris yang menyatakan 1 Bahwa telah mengajukan permohonan perbaikan isian data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer pada tanggal xxx, terhadap SKT nomor xx tanggal xxx; 2 Bahwa saya telah melakukan kesalahan pengisian data pada transaksi sebagaimana disebutkan dalam angka 1, atas kesalahan tersebut saya mengajukan permohonan perbaikan PP/Firma/CV xxx, adapun jenis perbaikan adalah xxxx 3 Bahwa badan usaha xxx telah memberikan kuasa kepada saya untuk pengurusan terkait perbaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dan surat kuasa tersebut telah tersimpan dengan baik pada kantor saya; 4 Bahwa badan usaha xxx tersebut tidak sedang dalam sengketa hukum apapun; 5 Bahwa saya telah membaca dan memahami tentang peraturan peundang-undangan terkait Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai hukum yang berlaku. - Diberi waktu untuk mempersiapkan dokumen pendukung sebelum diunggah. - Setelah disimpan, permohonan akan dikirim kepada Verifikator untuk dilakukan pemeriksaan.

4	Menerima perbaikan isian data dengan tampilan sesuai dengan tanggal masuk permohonan, melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika setuju, diteruskan ke Verifikator 2. Jika pemrohonan ditolak maka verifikor akan mengirim pesan yang akan dikirim kepada pemohon melalui email yang didaftarkan.	Permohonan perbaikan isian data	3 Hari	Berupa persetujuan yang disetujui atau koreksi	
5	Menerima dengan tampilan sesuai dengan urutan yang telah diklik oleh verifikator 1, melakukan verifikasi dengan prinsip kehati-hatian verifikasi 2 tahap. Jika disetujui maka akan muncul notifikasi kepada pemohon untuk mendownload SKT yang telah diperbaiki. Jika ditolak, maka akan dikembalikan kepada verifkator 1 untuk mengirim pesan kepada pemohon dengan menggunakan voucher baru sesuai dengan PP PNBP sebesar Rp. 250.000 per permohonan.	Permohonan perbaikan isian data dari verifikator 1	3 Hari	Berupa persetujuan yang disetujui atau koreksi	
6	Mengunduh SKT yang telah diperbaiki	Notifikasi persetujuan	-	SKT yang telah diperbaiki telah diunduh	
		Total Waktu	6 Hari		

